

Siaran Pers

SEKOLAH ASRAMA DAN TELEMEDICINE: INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Jakarta (21/8) – Dalam pidatonya di acara *Indonesian Diaspora Global Summit* yang dilaksanakan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin siang, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan pendekatan inovatif dalam mengatasi tantangan pendidikan dan kesehatan serta isu pembangunan di Papua dan Papua Barat. Indeks Pembangunan Manusia di Papua dan Papua Barat pada 2016 tercatat 58,05 dan 62,21 dengan ketimpangan antar kabupaten/kota yang cukup tinggi. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Indonesia 2016 yaitu 70,18. Angka Harapan Hidup 2016 untuk Papua dan Papua Barat adalah 65,13 dan 65,30, sementara Angka Harapan Hidup Indonesia 2016 sudah menyentuh angka 70,90. Persentase jumlah penduduk miskin 2016 di Papua dan Papua Barat, terutama masyarakat yang bermukim di wilayah pegunungan, juga masih tinggi, dengan angka 28,54 persen untuk Papua dan 25,43 persen untuk Papua Barat. Secara total, Papua dan Papua Barat menerima dana pembangunan sebesar 80 triliun rupiah, dengan perincian transfer dana pusat ke daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dana *revenue sharing*, dan dana otonomi khusus sebesar 60 triliun rupiah, serta dana yang dialokasikan kementerian/lembaga sebesar 20 triliun rupiah. “Ini yang akan kita bereskan dengan Instruksi Presiden, khusus terkait *desk* pembangunan Papua dan Papua Barat, di mana pelaksanaannya dapat melibatkan diaspora Indonesia,” tutur Menteri Bambang.

Fokus pembangunan di Papua dan Papua Barat adalah pelayanan dasar, perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas, dan perbaikan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan. Arah kebijakan prioritas nasional pembangunan Papua dan Papua Barat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 terbagi atas delapan poin, yaitu: 1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan; 2) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; 3) Perlindungan sosial dan kemiskinan; 4) Penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat; 5) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar; 6) Pengembangan konektivitas wilayah; 7) Pengelolaan sumber daya alam unggulan, pengembangan industri lokal dan strategis serta pariwisata; dan 8) Penataan kelembagaan dan regulasi, serta tanah ulayat. “Pendidikan adalah kunci pembangunan Papua dan Papua Barat sehingga sekolah berpola asrama harus diimplementasikan, mengingat kondisi permukiman yang tersebar dan berjauhan menjadi tantangan tersendiri bagi siswa Papua dan Papua Barat,” ujar Menteri Bambang.

Sekolah berpola asrama diyakini dapat bermanfaat untuk meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan, menjadi media transisi peradaban, membentuk pola hidup yang lebih baik, memperkuat komitmen penyelenggaraan pendidikan, memerankan fungsi keluarga, meningkatkan keterampilan hidup dan kemampuan akademis, meningkatkan kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan, juga meningkatkan kesehatan fisik. Di bidang kesehatan, pemerintah mengembangkan layanan *telemedicine*, yakni pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh. Aplikasi *telemedicine* menggunakan teknologi satelit untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitas-fasilitas kesehatan menggunakan peralatan konferensi video. Tahap awal, pemerintah fokus untuk pemasangan jaringan *telemedicine* di daerah yang memiliki akses internet yang baik dan pembangunan pusat konsultasi/pengampu *telemedicine* untuk mengampu rumah sakit kabupaten dan puskesmas. “*Telemedicine* bermanfaat untuk mengatasi keterbatasan dokter dan dokter spesialis terutama daerah terpencil, meningkatkan efisiensi dan mengurangi perjalanan pasien yang tidak diperlukan, menurunkan angka kasus rujukan dengan memperkuat sistem rujukan, mengatasi masalah waktu atau kelambatan pelayanan diagnostik, mengatasi keterbatasan sarana diagnostik di fasilitas kesehatan, serta mempermudah pengawasan pasien dan *home care*,” tegas Menteri Bambang.

Pemerintah menyiapkan tujuh strategi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Pertama, pembangunan berbasis wilayah adat dan difokuskan untuk Orang Asli Papua (OAP). Kedua, Percepatan pembangunan kampung terutama di daerah pegunungan tengah, daerah terpencil dan tertinggal yang sulit dijangkau. Ketiga, pelaksanaan dialog secara intensif dengan semua komponen masyarakat dan pemerintahan daerah. Keempat, pendampingan terhadap aparat pemerintah daerah dan masyarakat. Kelima, pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keenam, pemberdayaan OAP dan pengusaha lokal yang berdomisili di wilayah Papua. Ketujuh, peningkatan kerja sama kemitraan dengan swasta, serta kelompok masyarakat lainnya yang memiliki perhatian untuk Papua.

Jakarta, 21 Agustus 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650
Faksimile: (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id